

TAHUN
2018



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPATIHAN, DANUREJAN, YOGYAKARTA 55213

No. Telp/No. Faks (274) 589583, 562811 (Psw 1209-1220, 1243-1247, 1219.

Faximile (0274) 586712

Website www.bappoda.jogjaprov.go.id

Email: bappoda@jogjaprov.go.id, kode pos 55213

Kata Pengantar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2018 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018. LKjIP Bappeda DIY Tahun 2018 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

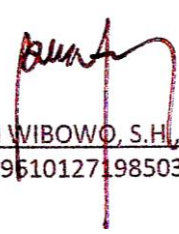
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2018 ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah DIY dan masyarakat secara keseluruhan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 22 Februari 2018

KEPALA BAPPEDA DIY


BUDI WIBOWO, S.H., M.M.
NIP 19610127198503 1 006

Ikhtisar Eksekutif



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP) Bappeda DIY Tahun 2018 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Bappeda DIY yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Bappeda DIY Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Bappeda DIY yang dihasilkan di tahun 2018, dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, dengan indikatornya Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah.

Capaian kinerja Bappeda DIY pada tahun 2018 adalah 107,93%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappeda DIY ke depan, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan
2. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan daerah melalui pendekatan yang bersifat kualitatif

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappeda DIY dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Struktur Organisasi.....	2
1.2 Fungsi dan Tugas	2
1.3 Isu-Isu Strategis	4
1.4 Keadaan Pegawai	4
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana	8
1.6 Keuangan	9
1.7 Sistematika LKj IP	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	12
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	12
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	16
2.1.3 Strategi dan arah Kebijakan	16
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	18
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2018.....	19
2.3.1 Target Belanja Bappeda DIY.....	19
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	20
2.4 Instrumen Pendukung.....	20
2.4.1 Sistem Informasi Perencanaan (jogjaplan).....	21
2.4.2 Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR).....	22
2.4.3 Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi.....	23
2.4.4 Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah (MDSD)/Geoportal	23

2.4.5 Sistem Aplikasi Dataku.....	24
2.4.6 Sistem Informasi Internal.....	25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2018.....	27
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	28
3.2.1 Sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas.....	29
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya.....	37

BAB IV PENUTUP.....40

LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi
Lampiran 2 Matriks Renstra 2017-2022
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Lampiran 4 Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun Sebelumnya
Lampiran 5 Penghargaan yang Pernah Diterima
Lampiran 6 Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor 061/1058

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda DIY Tahun 2018	9
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022	14
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Bappeda DIY Tahun 2017-2022.....	16
Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda DIY Tahun 2017-2022.....	17
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	19
Tabel 2.5 Target Belanja Bappeda DIY APBD Perubahan Tahun 2018.....	20
Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Bappeda DIY.....	20
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	27
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Bappeda DIY Tahun 2018.....	28
Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	30
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Bappeda DIY Tahun 2018.....	30
Tabel 3.5 Jumlah Indikator Sasaran OPD Tahun 2018.....	31
Tabel 3.6 Target Tahunan Jangka Menengah.....	34
Tabel 3.7 Persentase Target Kinerja Tahunan Jangka Menengah Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2018.....	35
Tabel 3.8 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017.....	36
Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Bappeda DIY Tahun 2018.....	38
Tabel 3.10 Analisis Efisiensi Bappeda DIY Tahun 2018.....	39

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Aplikasi Perencanaan (jogjaplan).....	22
Gambar 2.2 Website Sistem Informasi Perencanaan Ruang.....	22
Gambar 2.3 Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pemda DIY.....	23
Gambar 2.4 Website Meta Data Spasial Daerah.....	24
Gambar 2.5 Aplikasi Pengelolaan Data Statistik Daerah.....	25
Gambar 2.6 Aplikasi Internal Bappeda DIY.....	26
Gambar 3.1 Target dan Realisasi Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2018.....	31
Gambar 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja 2018 dan Target Tahunan Jangka Menengah.....	34

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

- 1. Struktur Organisasi*
- 2. Fungsi dan Tugas*
- 3. Isu Strategis*
- 4. Keadaan Pegawai*
- 5. Keadaan Sarana dan Prasarana*
- 6. Keuangan*
- 7. Sistematika LKj IP*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda DIY Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda DIY Tahun 2018 diharapkan dapat:

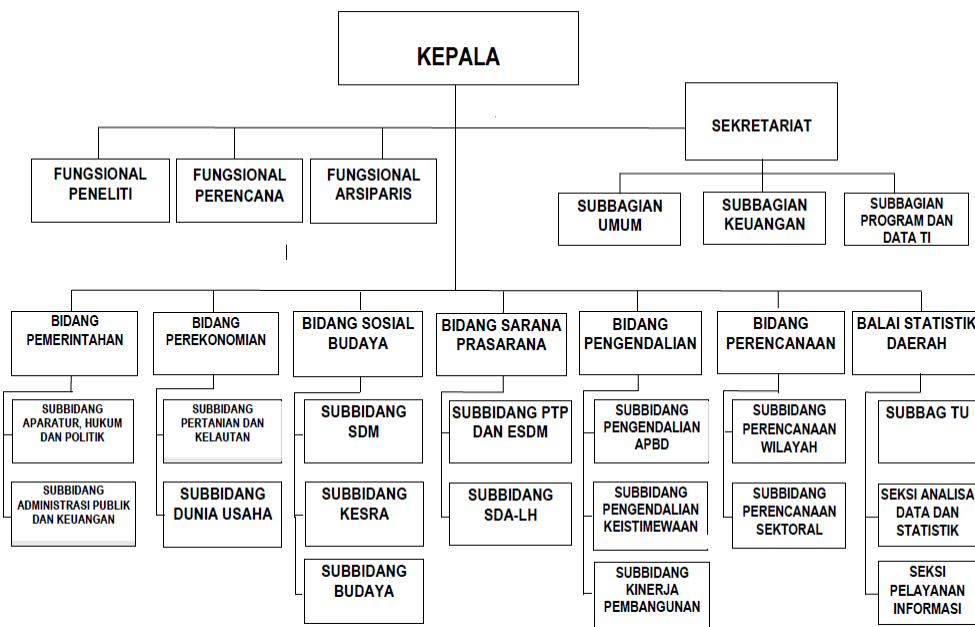
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Bappeda DIY
2. Mendorong Bappeda DIY di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda DIY untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Bappeda DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Struktur Organisasi

Bappeda DIY dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bappeda DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Pelaksanaan anggaran pada tahun 2018 masih menggunakan struktur Perda Keistimewaan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun Renstra 2017-2022 yang ditetapkan pada Mei 2018 disusun berdasarkan proyeksi struktur baru Pemerintah Daerah DIY.

1.2 Tugas dan Fungsi

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 Tanggal 2 September 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan bahwa Bappeda DIY mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda DIY mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Penyelenggaraan pengendalian program pembangunan di Daerah;
- 5) Pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dan pengendalian program urusan keistimewaan;
- 6) Penyelenggaraan statistik dan pelayanan informasi perencanaan;
- 7) Penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Gubernur, laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
- 8) Penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
- 9) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda DIY senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan baik, namun demikian banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan Bappeda DIY dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yang pertama adalah para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, dan yang kedua adalah bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan itu berjalan.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup pemerintah dan masyarakat (termasuk di dalamnya wakil rakyat). Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah adalah proses politisnya (dibanding teknokratisnya).

Memperhatikan faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan Bappeda DIY dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bappeda selalu berusaha

meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait, dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.3 Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Bappeda DIY , antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah;
2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencanaan dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran; dan
3. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan. Sedangkan permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan statistik yaitu:
 - (a) Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang statistik dalam pengolahan data;
 - (b) Terdapat beberapa pihak penyedia data untuk data yang sama; dan
 - (c) Ketergantungan pada pihak diluar instansi perencanaan dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan

1.4 Keadaan Pegawai

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bappeda DIY yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bappeda DIY di dukung sumberdaya yang tersebar dalam Instansi Induk (Bappeda) dan UPT (Balai Statistik Daerah).

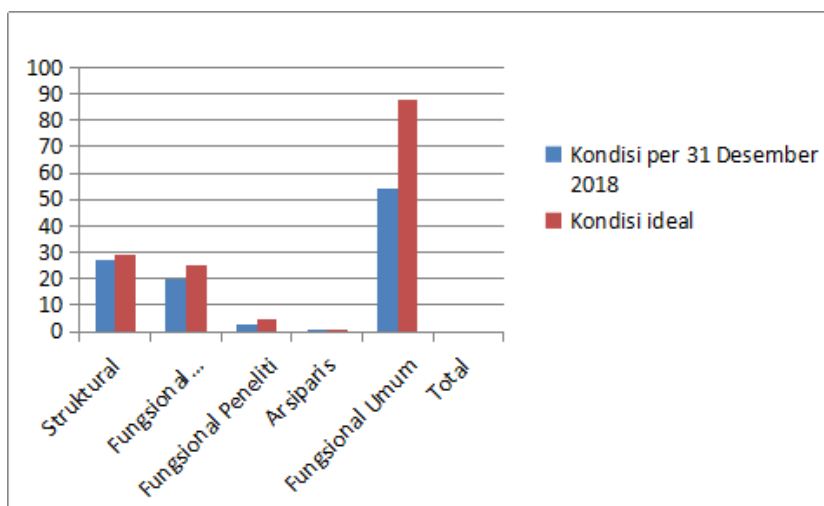
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda DIY diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Bappeda DIY sampai dengan 31 Desember 2018, tercatat sebanyak 105 pegawai yang terdiri 27 pejabat struktural, 24 pejabat fungsional tertentu, dan 54 pejabat fungsional umum yang terbagi di Instansi Induk (Bappeda DIY) sebanyak 96 pegawai yang terdiri dari 24 orang

pejabat struktural, 24 pejabat fungsional tertentu (20 fungsional Perencana, 3 fungsional peneliti dan 1 arsiparis), dan 48 orang fungsional umum. Sedangkan pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Balai Statistik Daerah (BSD DIY) sebanyak 9 orang terdiri dari 3 Pejabat Struktural dan 6 orang Fungsional Umum.

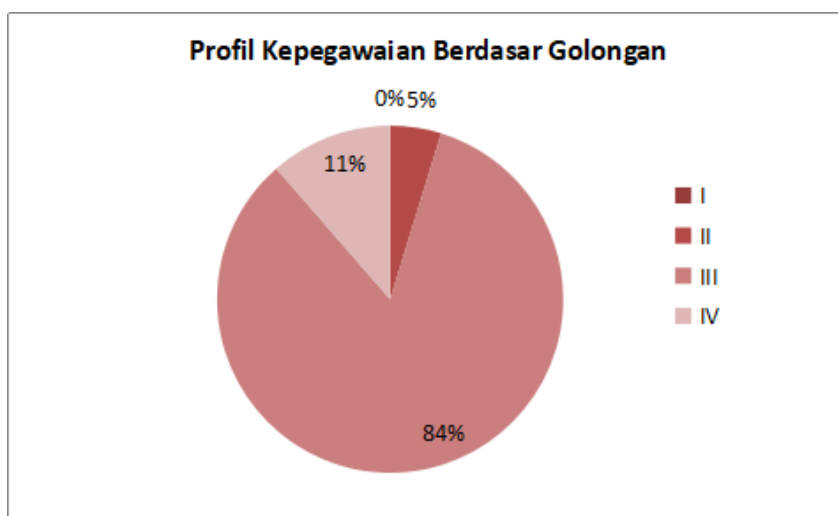
Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2015 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah DIY dan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2015 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana, untuk menjalankan tugas dan fungsi Bappeda, diperlukan Sumberdaya Manusia yang ideal di instansi Induk (Bappeda) yaitu 25 Pejabat Struktural, 31 pejabat fungsional tertentu (25 fungsional perencana, 4 fungsional peneliti, 1 arsiparis), dan 55 pejabat fungsional umum, sedangkan di BSD dibutuhkan 4 Pejabat struktural dan 33 Fungsional umum. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2018 Bappeda DIY secara keseluruhan masih ada kekurangan SDM. Dengan kondisi SDM yang ada, Bappeda berusaha menjalankan tugas dan fungsi secara optimal dengan dukungan Tenaga Ahli maupun tenaga Non PNS untuk mengimbangi beban kerja yang menjadi tugas - tugas Bappeda. Profil kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan, dan kebutuhan pegawai secara ideal.

Profil Kepegawaian Bappeda DIY disajikan dalam tabel berikut :

Gambar 1.2. Grafik Profil Kepegawaian berdasar Jabatan Pejabat Struktural Bappeda DIY Tahun 2018



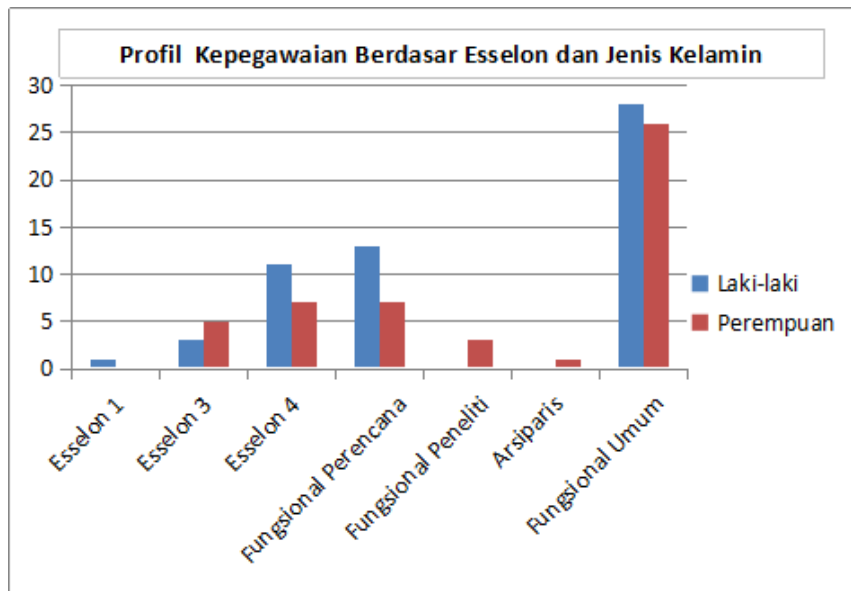
Gambar 1.3. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Golongan Bappeda DIY Tahun 2018



Berdasarkan grafik di atas dapat terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai di Bappeda DIY terutama untuk jabatan fungsional umum agar dapat memberikan kinerja secara maksimal serta pegawai di Bappeda sebagian besar merupakan pegawai Golongan III.

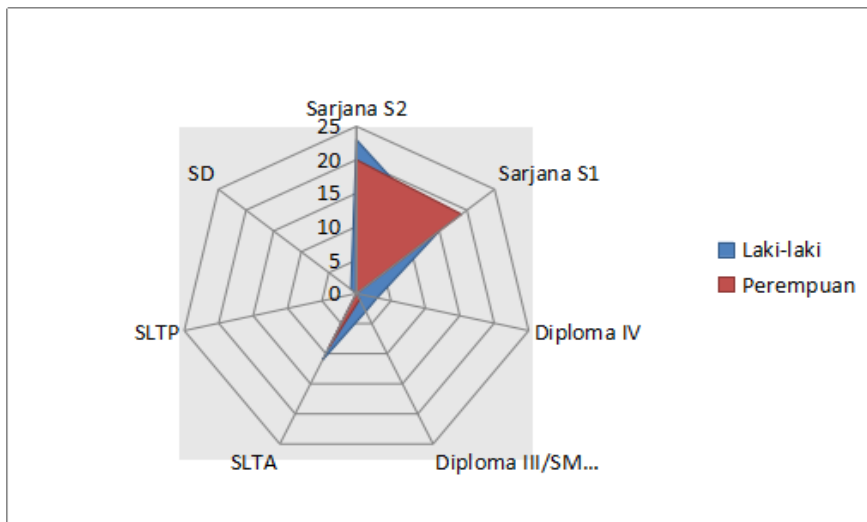
Profil kepegawaian berdasarkan eselon dan jenis kelamin Bappeda DIY dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.4. Grafik Profil Kepegawaian Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin Bappeda DIY Tahun 2018



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa di Bappeda DIY sudah mencerminkan keseimbangan gender dimana jumlah pegawai dan perempuan baik yang menduduki jabatan struktural (Eselon), fungsional tertentu dan fungsional umum jumlahnya sudah seimbang. Profil kepegawaian Bappeda DIY berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.5. Diagram Profil Kepegawaian Berdasarkan Tingkat Pendidikan Bappeda DIY Tahun 2018



Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi pegawai di Bappeda DIY lebih banyak didominasi oleh Sarjana S1 dan Sarjana S2 terkait dengan jabatan fungsional perencana dan peneliti yang membutuhkan tingkat pendidikan sarjana.

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Bappeda DIY sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Bappeda DIY dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Daftar Sarana dan Prasarana Bappeda DIY Tahun 2018

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi
1	Alat-alat besar	2	Baik
2	Alat-alat angkutan	24	Baik
3	Alat kantor dan rumah tangga	2.086	Baik
4	Alat studio dan alat komunikasi	264	Baik
5	Bangunan gedung	4	Baik
6	Jaringan	2	Baik
7	Buku perpustakaan	3.187	Baik

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappeda DIY. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda DIY pada tahun 2018 berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dana Keistimewaan. Pada Tahun Anggaran 2018 Bappeda DIY mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 25.531.479.364,50 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 6.544.977.745,00 dan belanja langsung sebesar Rp 18.986.501.619,50 yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp15.756.464.619,50 yang didukung oleh 10 program dan 32 kegiatan. Sedangkan belanja langsung yang berasal dari dana keistimewaan sebesar Rp3.230.037.000,00 yang didukung oleh 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan.

Selain Dana APBD dan Dana Keistimewaan, Bappeda DIY juga mengelola Dana APBN berupa Dana Dekonsentrasi Bappenas sebesar Rp 920.491.000,00 pada Program Perencanaan Pembangunan Nasional Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang Tahun 2018.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Bappeda DIY tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bappeda DIY Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB 2

Perencanaan & Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. *Perencanaan Strategis*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2018*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2018*
4. *Instrumen Pendukung*

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2018, Bappeda DIY menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda DIY Tahun 2017-2022. Renstra Bappeda DIY merupakan manifestasi komitmen Bappeda DIY dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah DIY yang tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Bappeda DIY Tahun 2017-2022

tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).

RPJMD Pemerintah Daerah DIY merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Bappeda DIY yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2018, Renstra Bappeda DIY Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Gubernur DIY yang dituangkan dalam RPJMD DIY berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2012-2017) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2017-2022). Visi Misi Gubernur DIY pada perencanaan periode 2017-2022 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya. Gubernur DIY pada Sidang Paripurna Istimewa tanggal 2 Agustus 2017 memaparkan pidato visi misi dengan tema **“Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”**. Pemaparan ini sebagai bagian dari rangkaian proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk periode 2017-2022 seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY Tahun 2012-2017. Tema visi dalam pemaparan visi misi Gubernur DIY tersebut dilandasi pada aspek kesejahteraan, fenomena-fenomena Kemaritiman terkini (*Indian Ocean Rim Association (IORA)*, *Kra-Canal/ Thai Canal Project*) serta Kemiskinan di Kawasan Jogja Selatan. Dalam rangka mewujudkan tema visi tersebut, Gubernur DIY menyampaikan misi “Lima Kemuliaan” atau “Panca Mulia”, yakni:

1. terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan ketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,
2. terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
3. terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
4. terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
5. terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berangkat dari uraian tema pidato di atas, dapat diartikan bahwa Abad Samudera Hindia menjadi arah dari pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi Selatan Yogyakarta agar tercapai kemuliaan martabat manusia khususnya dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya. Secara teknokratik, Pidato Visi Misi tersebut kemudian dituangkan dalam RPJMD DIY 2017-2022 dengan Visi :

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

Visi Gubernur DIY tersebut dilaksanakan dengan 2 (dua) misi antara lain:

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban. Misi tersebut merangkum Panca Mulia ke-1, 2 dan 3.
2. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis. Misi tersebut merangkum Panca Mulia ke-4 dan 5.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPJMD DIY 2017-2022 sebagai berikut,

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022

Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia”					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin ke-bhineka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta	Angka IGI (5,59) (2016) menjadi 6,2 (2022)	1.1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
				1.2. Meningkatnya derajat ekonomi masyarakat.	Indeks Gini
					Persentase Angka Kemiskinan
				1.3. Meningkatnya Derajat Kualitas hidup sosial masyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Visi: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia”					
No.	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				1.4. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi
				1.5. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi.
					IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)
					Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
					Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan
				1.6. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah.	Indeks Williamson
2.	Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;	Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance).	Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai 73,07 (BB) dalam kategori baik (2016) menjadi Sangat Baik dengan nilai 76 (A) (2022)	2.1. Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan	Opini BPK
					Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP)
				2.2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan	Prosentase capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan.
				2.3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa	bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan

Sumber : RPJMD DIY 2017-2022

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Bappeda DIY berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu : meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan dengan indikator capaian sasaran Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP).

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Bappeda DIY selama 5 tahun anggaran adalah : Menjadi Institusi Perencana yang Bernilai Tinggi

Sasaran Strategis

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Bappeda DIY Tahun 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	Target tahunan					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	persen	83	83,5	84	84,5	85	85,5	85,5

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bappeda DIY Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda DIY Tahun 2017-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoptimalkan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. b. Mendorong SDM aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan. c. Mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk membangun sinergi melalui forum Pentahelix. d. Mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk mewujudkan integrasi sistem perencanaan pembangunan e. Optimalisasi SDM untuk meningkatkan standar mutu perencanaan dan pengendalian Pembangunan f. Meningkatkan peran forum Pentahelix untuk membangun sinergi dengan kabuapten/kota g. Meningkatkan Teknologi Informasi untuk mengatasi perubahan kebijakan yang sering terjadi h. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, Monitoring dan Evaluasi i. Memanfaatkan komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan koordinasi j. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk memperkecil dampak perubahan kebijakan k. Integrasi sistem perencanaan pembangunan meningkatkan untuk kualitas perencanaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik Ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (jogjaplan) dan Monev (Sungguh) serta office management, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui media web Bappeda. b. Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan. c. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan monev pembangunan. d. Meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. e. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan indikator pembangunan f. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta kontrol terhadap capaian indikator. g. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan forum CSR dalam mendukung pembiayaan pembangunan.

		monitoring evaluasi l. Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan sinergitas dengan kabupaten/kota	h. Membangun link antar sistem informasi yang ada di internal Bappeda DIY dan dengan sistem informasi di luar Bappeda DIY yang terkait. i. Menjamin infrastruktur jaringan dan komputer berjalan optimal dan termaintain secara berkelanjutan j. Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik / program strategis bersama yang konsisten dan terukur k. Meningkatkan sistem aplikasi yang dimiliki mampu menampilkan informasi secara akurat guna memperkuat proses perencanaan berbasis bukti dan data l. Pengembangan sistem aplikasi yang dimiliki (Jogjaplan, Monev Sengguh, SINTAL, JOGJA DATAKU, dll) sesuai dengan kebutuhan. m. Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik / program strategis bersama yang konsisten dan terukur.
--	--	---	---

Sumber : Renstra Bappeda 2017-2022

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Bappeda DIY Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

N O.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	%	83,50	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 83,50

Sumber : Bappeda, 2018

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018 Bappeda DIY melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp 25.531.479.364,50,- (termasuk Dana Keistimewaan) dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 6.544.977.745,- dan Belanja Langsung Rp 18.986.501.619,50,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2018 menjadi sebesar Rp 25.635.624.617,- (termasuk Dana Keistimewaan) dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 6.846.905.797,- dan Belanja Langsung Rp 18.788.718.820,-.

2.3.1 Target Belanja Bappeda DIY

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Bappeda DIY menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp 25.635.624.617,- (termasuk Dana Keistimewaan) dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 6.846.905.797,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 18.788.718.820,- (termasuk Dana Keistimewaan).

Tabel 2.5 Target Belanja Bappeda DIY APBD Perubahan Tahun 2018

No	Uraian	Target	Prosentase
1	Belanja Tidak Langsung Non Keistimewaan	Rp. 6.846.905.797,-	26,71%
2	Belanja Tidak Langsung Keistimewaan	-	-
3	Belanja Langsung Non Keistimewaan	Rp. 15.617.306.820,-	60,92%
4	Belanja Langsung Keistimewaan	Rp. 3.171.412.000,-	12,37%
	Jumlah	Rp. 25.635.624.617,-	100%

Sumber : Bappeda, 2018

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2018 Bappeda DIY yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis Bappeda DIY

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Rp. 15.425.442.400,00	81,24%	-
	Dari Dana Non Keistimewaan	Rp. 12.195.405.400,00		Program perencanaan pengendalian, dan statistik
	Dari Dana Keistimewaan	Rp. 3.230.037.000,00		Program perencanaan dan pengendalian Keistimewaan
2.	Program pendukung	Rp. 3.561.059.219,50	18,76%	Program kesekretariatan
	Jumlah	Rp. 18.986.501.619,50	100%	

Sumber : Bappeda, 2018

2.4. Instrumen Pendukung

Dalam rangka mencapai target kinerja Bappeda DIY Tahun 2018, digunakan instrumen-instrumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dengan membangun beberapa sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di DIY. Bappeda DIY selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut Bappeda DIY membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Bappeda DIY sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda DIY sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Pada tahun 2013 telah dibangun integrasi data yang disimpan dalam server yang terbagi dalam segmen-segmen bidang. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Bappeda DIY membangun beberapa sistem informasi.

2.4.1. Sistem Informasi Perencanaan (jogjaplan)

Sistem Informasi Perencanaan (<http://jogjaplan.com>) berfungsi sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai dengan ditetapkannya KUA PPAS. Keberadaan Sistem Informasi Perencanaan sampai saat ini mampu mendukung sistem perencanaan pembangunan di DIY. Pengembangan aplikasi jogjaplan memberikan sumbangan terhadap kualitas perencanaan pembangunan yang cukup signifikan dari tahun ke-tahun yang selalu mengalami peningkatan.



Gambar 2.1. Aplikasi Perencanaan (jogjaplan)

2.4.2. Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR)

Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR) dengan alamat akses <http://sipr.jogjaprov.go.id>, berfungsi sebagai alat bantu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah DIY di dalam menjalankan tugasnya yaitu memaduserasikan (mengkoordinasikan) penataan ruang provinsi dengan kabupaten/kota.



Gambar 1.2. Website Sistem Informasi Perencanaan Ruang

Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah selalu membawa konsekuensi yang harus diantisipasi. Kebutuhan ruang dalam melaksanakan aktivitas manusia yang selalu berkembang akan selalu memunculkan konflik ruang baik secara sosial, ekonomi, maupun ekologis. SIPR sebagai salah satu alat/tool

diharapkan mampu membantu BKPRD DIY dalam melaksanakan tugas dalam konteks meminimalkan konflik-konflik yang berpotensi muncul.

2.4.3. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan (SI-Monev terdiri dari E-Sakip, Monev APBD, Monev APBN, ROPK, Penilaian Kinerja) dengan alamat akses <http://sungguh.jogjaprov.go.id>. Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap OPD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel;



**Gambar 2.2. Aplikasi Monitoring Dan Evaluasi Pemda
DIY**

Sistem monev yang dimiliki Bappeda DIY dalam usaha Pemerintah DIY meningkatkan akuntabilitas pembangunan mampu meningkatkan performa Pemerintah DIY untuk mewujudkan akuntabilitas pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dengan penilaian yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan status akuntabilitas kinerja pembangunan yang baik.

2.4.4. Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah (MDSD)/ Geoportal

Sistem Informasi MDSD berfungsi untuk memberikan informasi data spasial daerah yang dimiliki Pemda DIY secara umum sesuai dengan arah kebijakan Badan

Informasi Geospasial. MDSD dengan alamat akses <http://gis.jogjaprov.go.id>, juga berfungsi sebagai media untuk berbagi data spasial antar pengguna sistem.



Gambar 2.3. Website Meta Data Spasial Daerah

Sistem Metadata Spasial merupakan sistem yang dibangun Bappeda sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik atas penyediaan data spasial (keruangan) kepada publik. Publik dapat mengakses data melalui sistem MDSD dan mengambil manfaat dari data dan informasi spasial yang terkandung didalamnya.

2.4.5. Sistem Aplikasi Dataku

Sistem Aplikasi Dataku dengan alamat akses <http://Bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/> dikembangkan mulai tahun 2014 yang merupakan pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan data perencanaan dengan tujuan untuk mengintegrasikan data perencanaan pembangunan yang berasal dari semua stakeholder penyedia data baik provinsi maupun kabupaten/kota.



Gambar 2.4. Aplikasi Pengelolaan Data Statistik Daerah

Sistem Aplikasi Dataku merupakan sistem pengelolaan data yang berusaha mengintegrasikan penyediaan data di masing-masing OPD sehingga mudah diakses oleh pengguna data dan mempermudah koordinasi penyediaan data untuk perencanaan pembangunan daerah.

2.4.6 Sistem Informasi Internal

Bappeda DIY merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi sebagai koordinator perencanaan pembangunan dalam lingkup Pemda DIY. Sebagai OPD Bappeda DIY seyogyanya bisa menjadi contoh bagi OPD lain guna mewujudkan pengelolaan program kegiatan yang lebih baik. Tingginya tuntutan akan ketepatan data dan informasi membuat Bappeda DIY selalu berbenah dari waktu ke waktu. Peningkatan manajerial yang didukung dengan peningkatan teknologi pendukung selalu menjadi inovasi yang dapat diandalkan sebagai solusi utama. Teknologi terbukti mampu menciptakan efektifitas kerja dan akurasi hasil pekerjaan.

Aplikasi internal telah dikembangkan pada tahun 2015, dalam aplikasi ini dibangun fungsi dasar dalam proses pemantauan data monitoring evaluasi dan pengelolaan anggaran yang melibatkan multi bidang di internal Bappeda DIY. Pengembangan tersebut terbukti mampu membawa Bappeda DIY untuk meningkatkan kualitas aparatur menjadi lebih baik.



Gambar 2.5. Aplikasi Internal Bappeda DIY

Saat ini keberhasilan yang sudah diraih tersebut membuat Bappeda DIY semakin optimis untuk melangkah lebih jauh. Aplikasi Internal akan dikembangkan kembali untuk fungsi-fungsi yang lebih luas dan detail. Berbagai fitur teknologi ingin diwujudkan untuk semakin meningkatkan kemampuan aplikasi guna penanganan yang lebih optimal. Tahun 2016 aplikasi internal mengawal Bappeda DIY sebagai OPD yang mampu memberikan ketauladanan bagi OPD lainnya dalam konteks manajemen program kegiatan dalam lingkup satu OPD.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. *Capaian Kinerja Tahun 2018*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis*
3. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya*
4. *Realisasi Anggaran*
5. *Inovasi*

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2018

Bappeda DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bappeda DIY tahun 2018 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bappeda DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Bappeda DIY Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	%	83,5	91,35	109,4	Sangat baik

Sumber : Bappeda, 2018

Bappeda DIY memiliki 1 (satu) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis Bappeda DIY. Pada tahun 2018, indikator sasaran tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan (**tercapai $\geq 100\%$**) dari total indikator dengan persentase capaian sebesar 109,4%, atau melampaui dari target yang ditetapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tahun 2018 merupakan tahun pertama dalam perencanaan jangka menengah sehingga terdapat penyesuaian sasaran kinerja Bappeda DIY yang baru yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan baik program utama maupun program pendukung selama tahun anggaran 2018. Program – program tersebut dilaksanakan oleh bidang sektoral, bidang perencanaan, pengendalian, sekretariat serta Unit Pelaksana Teknis BSD. Program – program yang telah diselenggarakan antara lain sebagai berikut :

1. Program utama
 - a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian
 - c. Program Perencanaan Sosial Budaya
 - d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana

- e. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
 - f. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
 - g. Program Pengembangan Statistik Daerah
 - h. Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan
2. Program pendukung
- a. Program Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan

Program – program di atas masing- masing memberikan kontribusi/dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran Tahun 2018.

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Bappeda DIY yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas

Tolok ukur capaian sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas diukur dengan 1 (satu) indikator. Indikator tersebut adalah Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

NO	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	Indikator sasaran pada tahun N yang tercapai/indikator sasaran RPJMD X 100%

Sumber : Renstra Bappeda, 2017-2022

Kinerja sasaran Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas dengan indikator Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah pada tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Bappeda DIY Tahun 2018

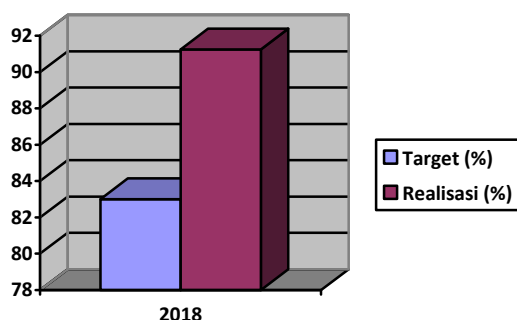
No	Indikator Sasaran	Baseline 2017	2018			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2018 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	83	83,5	91,35	$(91,35/83,5) \times 100\% = 109,4\%$	85,5	106,85

Sumber : Bappeda, 2018

Realisasi capaian kinerja Bappeda Tahun 2018 adalah sebesar 91,35% atau 109,4% dari target awal sebesar 83,5% sehingga pada tahun ini kinerja Bappeda DIY secara umum telah tercapai.

Penghitungan indikator dilakukan dengan membandingkan antara indikator sasaran perangkat daerah pada tahun N yang tercapai dengan jumlah indikator

sasaran secara keseluruhan pada RPJMD. Realisasi kinerja pada tahun 2018 adalah sebesar 91,35% sedangkan targetnya sebesar 83,5%, sehingga tingkat ketercapaian sasaran perangkat daerah adalah sebesar 109,4%, atau melampaui target yang telah ditetapkan. Persentase target dan realisasi sasaran perangkat daerah pada tahun 2018 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.1. Target dan Realisasi Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2018

Penghitungan realisasi sasaran baru dapat dilakukan pada triwulan IV karena komponen penghitungan yang digunakan adalah ketercapaian sasaran perangkat daerah di Pemda DIY, dan data tingkat capaian baru tersedia di triwulan IV tahun 2018. Penghitungan realisasi capaian sebesar 91,35% diperoleh dari jumlah sasaran perangkat daerah yang tercapai yaitu sebanyak 74 sasaran dibagi dengan jumlah seluruh sasaran perangkat daerah sebanyak 81 sasaran, dikalikan 100%.

Rekapitulasi ketercapaian indikator sasaran per OPD ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Jumlah Indikator Sasaran OPD Tahun 2018

No.	OPD	Jumlah indikator	Tercapai	Tidak Tercapai
1.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7	5	2
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2	1	1

3.	Dinas Kebudayaan	4	4	0
4.	Dinas Kesehatan	2	2	0
5.	Dinas Sosial	2	2	0
6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	3	0
7.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	2	0
8.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah	2	2	0
9.	Dinas Pariwisata	2	2	0
10.	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	2	0
11.	Badan Kepegawaian Daerah	1	1	0
12.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	0
13.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1	1	0
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	1	0
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	0
16.	RS. Grhasia	1	1	0
17.	Biro Umum dan Protokol	1	1	0
18.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4	4	0
19.	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	2	2	0
20.	Dinas PUP ESDM	8	8	0
21.	Dinas Perhubungan	1	1	0
22.	Dinas Pertanian	1	0	1
23.	BKPP	1	1	0
24.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3	1	2
25.	Badan Lingkungan Hidup	1	1	0
26.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	2	2	0
27.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	4	3	1

28.	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal	1	1	0
29.	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	1	1	0
30.	Biro Hukum	2	2	0
31.	Biro Organisasi	2	2	0
32.	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1	1	0
33.	Biro Tata Pemerintahan	2	2	0
34.	Biro Administrasi Pembangunan	1	1	0
35.	Sekretariat Parampara Praja	1	1	0
36.	Sekretariat DPRD	1	1	0
37.	Rumah Sakit Paru Respira	1	1	0
38.	Kantor Perwakilan Daerah	1	1	0
39.	Kantor Pelayanan Perijinan Satu Pintu	1	1	0
40.	Inspektorat	1	1	0
Total		81	74	7

Sumber : Bappeda, 2018

Dari total 81 indikator sasaran perangkat daerah, 8 indikator sasaran tidak dapat melampaui target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD, dan sebanyak 74 indikator sasaran telah tercapai. 7 indikator sasaran tersebut meliputi :

- 1) Rata-rata hasil ujian nasional SMK, dengan ketercapaian 95%, pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- 2) Prestasi cabang olahraga, dengan ketercapaian 50%, pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- 3) Peringkat keterbukaan informasi bagi Badan Publik level provinsi, dengan ketercapaian 37,5%, pada Dinas Komunikasi dan Informatika
- 4) Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB, dengan ketercapaian 98,10%, pada Dinas Pertanian
- 5) Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB, dengan ketercapaian 99,5%, pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan

- 6) Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB, dengan ketercapaian 98,10%, pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- 7) Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan ketercapaian 72,92%, pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

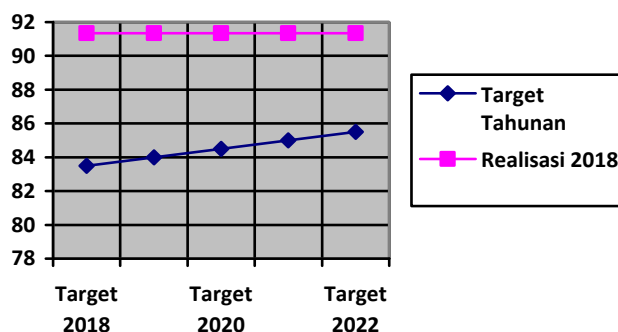
Jika realisasi kinerja pada tahun 2018 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka realisasi juga telah melampaui target 2022 sebesar 85,5%. Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2018 dengan target akhir RPJMD adalah 109,4%. Target tahunan jangka menengah pada rencana strategis (Renstra) Bappeda ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.6. Target Tahunan Jangka Menengah

No	Tujuan	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				Baseline 2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Menjadi Institusi Perencana yang Bernilai Tinggi	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indikator sasaran PD tahun N yang tercapai/Indikator sasaran RPJMD x 100%	83	83,5	84	84,5	85	85,5

Sumber : Renstra Bappeda 2017-2022

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dengan target tahunan jangka menengah ditampilkan pada gambar berikut :



Gambar 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja 2018 dan Target Tahunan Jangka Menengah

Persentase realisasi kinerja tahun 2018 dibandingkan dengan target tahunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7.Persentase Target Kinerja Tahunan Jangka Menengah terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2018

No.		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Target	83,5%	84%	84,5%	85%	85,5%
2.	Persentase	109,4%	108,75%	108,1%	107,47%	106,84%

Sumber : Bappeda, 2018

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Bappeda DIY Tahun 2018 antara lain sebagai berikut :

- a. Dukungan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan statistik.
- b. Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda
- c. Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan
- d. Ketersediaan data-data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program dan kegiatan

Indikator sasaran Bappeda DIY Tahun 2018 berbeda dengan indikator sasaran tahun 2017 sehingga kinerja antara tahun 2017 dan 2018 tidak dapat dibandingkan. Pada tahun 2017 Bappeda DIY memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan indikator sasaran sebanyak 11 indikator sasaran. Sasaran strategis tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Sinergis, Terukur, Konsisten, Lengkap, Partisipatif, dan Inovatif
2. Terwujudnya Pengendalian Pembangunan Daerah Yang Komprehensif Pada Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi internal, dan Pencapaian Sasaran Kinerja

Sasaran, indikator sasaran, target dan realisasi kinerja pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8.Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2017)
				Target	Realisasi	% Realisasi*	
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Sinergis, Terukur, Konsisten, Lengkap, Partisipatif, dan Inovatif	Persentase Sinergitas Perencanaan	n/a	95	100	105,26%	95
		Persentase Keterukuran Perencanaan	n/a	90	100	111,11%	90
		Persentase Konsistensi Perencanaan	n/a	90	100	111,11%	90
		Persentase Kelengkapan Perencanaan	n/a	92	100	108,70%	92
		Persentase Tingkat Partisipasi Dalam Perencanaan	n/a	90	100	111,11%	90
		Persentase Inovasi Yang Diperlukan Dalam Perencanaan	n/a	95	100	105,26%	95
2	Terwujudnya Pengendalian Pembangunan Daerah Yang Komprehensif Pada Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, Evaluasi internal, dan Pencapaian Sasaran Kinerja	Persentase Tingkat Pengendalian Perencanaan Kinerja	n/a	90	100,92	112,14	90
		Persentase Tingkat Pengukuran Kinerja	n/a	90	102,90	114,33	90
		Persentase Tingkat Pelaporan Kinerja	n/a	95	104,83	110,35	95
		Persentase Tingkat Evaluasi Internal	n/a	95	100,12	105,39	95
		Persentase Tingkat Pencapaian Sasaran Kinerja	n/a	98	104,26	106,39	98

Sumber : LKjIP Bappeda, 2017

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar Rp 16.904.391.211,- (89,03%) dari total anggaran yang dialokasikan termasuk Dana Keistimewaan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp 13.905.799.276,- (73,24%), sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.999.141.242 (84,22%). Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Bappeda DIY Tahun 2018 sebagai berikut :

1. APBD Belanja tidak langsung sebesar Rp 6.418.915.813,00 (26,60%);
2. APBD Belanja langsung sebesar Rp 16.904.391.211,00 (70,06%);
3. APBN sebesar Rp 803.686.702,00 (3,33%) .

Realisasi anggaran yang dikelola Bappeda Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran belanja langsung APBD Non Keistimewaan untuk program utama sebesar Rp 11.285.799.276,00 (92,54%) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program utama sebesar Rp 12.195.405.400,00);
2. Realisasi anggaran Belanja Langsung Keistimewaan untuk program Utama sebesar Rp 2.619.450.693,00 (81,10%) dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 3.230.037.000,00);
3. Realisasi anggaran program pendukung sebesar Rp 2.999.141.242,00 (84,22%) dari total anggaran yang dialokasikan untuk program pendukung sebesar Rp 3.561.059.219,50);
4. Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 6.418.915.813,00 (98,07%) dari total anggaran yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 6.544.977.745,00.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2018 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.9. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Bappeda DIY
Tahun 2018**

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Targ et	Realis asi	% Realis asi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realis asi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	83,5	91,35	109,4	15.756.464.619,50	13.905.249.969	88,25
	APBD Non Keistimewaan					12.195.405.400	11.285.799.276	92,54
	APBD Keistimewaan					3.230.037.000	2.619.450.693	81,10
	Belanja langsung pendukung					3.561.059.219,50	2.999.141.242	84,22
	Belanja tidak langsung					6.544.977.745	6.418.915.813	98,07
	Jumlah belanja langsung		83,5	91,25	109,94	18.986.464.619,50	16.904.391.211	89,03
	Total Belanja		83,5	91,25	109,94	25.531.442.364,50	23.323.307.024	91,35

Sumber : Bappeda, 2018

Analisis efisiensi ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Analisis efisiensi Bappeda DIY Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembanguna n Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	109,4	91,35%	8,65%

Sumber : Bappeda, 2018

Analisis Efisiensi

Berdasarkan tabel 3.10 di atas, kinerja sasaran strategis Bappeda DIY telah melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebesar 8,65%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi dan penghematan penggunaan sarana prasarana.

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rencana Tindak Lanjut*

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda pada Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Bappeda Tahun 2017-2022. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

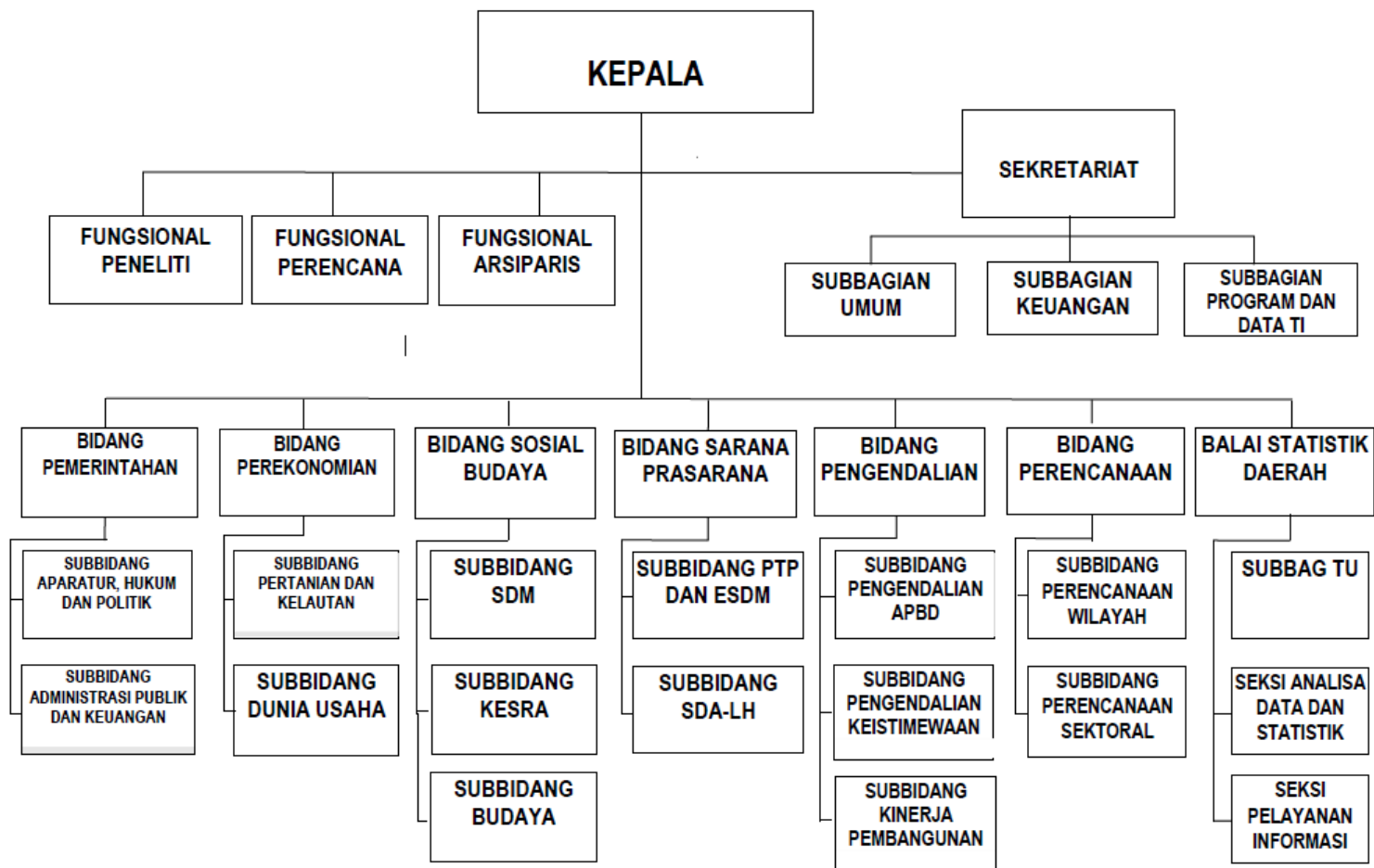
Hasil laporan kinerja Bappeda tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis sasaran perangkat daerah “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas”, dengan indikator persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah, realisasi kinerja Bappeda tahun 2018 adalah sebesar 109,4%
2. Realisasi kinerja Bappeda telah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 83,5%, dengan efisiensi anggaran sebesar 8,65%
3. Secara umum, pencapaian target tidak mengalami kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat, dan instrumen monitoring dan evaluasi pembangunan yang masih bersifat kuantitatif

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Penetapan sasaran dan target pembangunan daerah dilakukan melalui *cascading* RPJMD untuk memastikan kontribusi setiap program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah, maka perlu penajaman kegiatan sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran OPD.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas, melalui pendekatan 4 (empat) pilar *Balance Score Card* (BSC) yang

meliputi pendekatan *customer perspective*, *internal process*, *financial perspective*, dan *learning and growth perspective*



LAMPIRAN 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	Target tahunan					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	persen	83	83,5	84	84,5	85	85,5	85,5



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta 55213 Telepon (0274) 589583, 562811

(Psw1209-1220, 1243-1247, 1219), ,

Faximili. (0274) 586712 Website www.bappeda.jogjaprovo.go.id

Email : bappeda@jogjaprovo.go.id Kode Pos 55213

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. TAVIP AGUS RAYANTO, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 29 Januari 2018

Pihak Kedua
Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta



HAMENGKU BUWONO X

Pihak Pertama
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta



Drs. TAVIP AGUS RAYANTO, M.Si.
NIP. 19641107 199103 1 004

PERJANJIAN KINERJA

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun Anggaran : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	%	83,50	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	83,50

Jumlah Anggaran

1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	: Rp 19.709.210.020,00	Keterangan
2.	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	: Rp 3.747.406.000,00	Anggaran APBD
3.	Program Perencanaan Sosial-Budaya	: Rp 1.693.452.500,00	Anggaran Dekonsentrasi/ TP
4.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Dan Sarana Prasarana	: Rp 1.405.493.725,00	
5.	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	: Rp 938.105.000,00	
6.	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	: Rp 2.167.708.000,00	
7.	Program Pengembangan Statistik Daerah	: Rp 1.261.753.500,00	
8.	Program Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	: Rp 3.171.412.000,00	
9.	Program Administrasi Perkantoran	: Rp 2.038.913.500,00	

- | | | |
|--|---|---------------------|
| 10. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | : | Rp 1.011.092.350,00 |
| 11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan | : | Rp 527.418.245,00 |
| 12. Program Perencanaan Pembangunan Nasional (Dekonsentrasi) | : | Rp 920.491.200,00 |

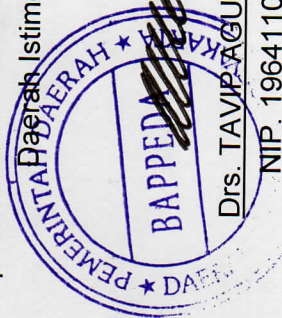
Yogyakarta, 29 Januari 2018

Pihak Kedua
Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta



HAMENGKU BUWONO X

Pihak Pertama
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta



Drs. TAVIP AGUS RAYANTO, M.Si.

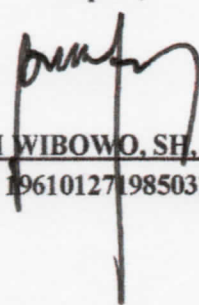
NIP. 19641107 199103 1 004



**TANGGAPAN/TINDAK LANJUT EVALUASI LKJ IP TAHUN SEBELUMNYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Pada tahun yang akan datang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY agar disampaikan tepat waktu yaitu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) disampaikan tepat waktu yaitu 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran 2018 berakhir
2.	Melakukan upaya untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja yang telah baik	Meningkatkan kualitas perencanaan dengan menerapkan cascading RPJMD untuk memastikan kontribusi setiap program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah, dan melakukan pengendalian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan Balance Score Card (BSC) yang meliputi 4 pilar, yaitu perspektif pelanggan, proses internal, perspektif keuangan, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

Yogyakarta, 22 Februari 2018

Kepala,


BUDI WIBOWO, SH, MM.
 NIP. 196101271985031006

NO	NAMA PENGHARGAAN	TGL/BLN/TAHUN PEMBERIAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA (INTERNASIONAL/ NASIONAL)	TINGKATAN/ JUARA KE-	KETERANGAN (PENGHARGAAN DIBERIKAN TERKAIT APA)	FOTO SERTIFIKAT/PIAGAM / PIALA
1	Bhumandala Rajata (Balai Statistik Daerah)	11/Desember/ 2018	Badan Informasi Geospasial	Nasional	2	Pengembangan Simpul Jaringan	
2	Bhumandala Kencana (Balai Statistik Daerah)	11/Desember/ 2018	Badan Informasi Geospasial	Nasional	2	Penyajian Informasi geospasial	

3	UN Public Service Awards (UNPSA) (Bappeda)	Oktober/2018	United Nations (UN)	Internasional	20 besar	Aplikasi JogjaPlan masuk dalam nominasi Indonesia dan menjadi peserta Lokakarya proposal inovasi untuk dikirim kepada penyelenggara UNPSA 2019	
---	--	--------------	---------------------	---------------	----------	--	---



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 521818
Website: biroorganisasi.jogjaprov.go.id Email: roorganisasi@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 061 / 1058

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diikuti penataan kelembagaan dan personil pada bulan Januari 2019.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur DIY No. 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk :
- a. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan menyampaikan kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pelaksanaan anggaran disahkan.

MEMERINTAHKAN

Kepada:

1. Kepala Perangkat Daerah dan Biro yang tidak berubah nomenklatur lembaganya, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 pada Perangkat Daerah masing-masing;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Dinas Pertanian DIY dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Dinas Kehutanan DIY dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Badan Lingkungan Hidup DIY serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Badan Perpustakaan dan Arsip DIY serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY;

7. Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY;
8. Kepala Dinas Kesehatan DIY, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Dinas Kesehatan DIY, RS. Jiwa Grhasia dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 RS. Respira serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan DIY, UPT RS. Jiwa Grhasia dan UPT RS. Respira;
9. Paniradya Pati Kaistimewan, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Sekretariat Parampara Praja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Asisten Keistimewaan Setda DIY serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Paniradya Kaistimewaan;
10. Kepala Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan DIYserta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY;
11. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY;
12. Kepala Biro Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY, untuk mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Biro Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY;
13. Kepala Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Biro Umum dan Protokol Setda DIY serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY;
14. Kepala Badan Penghubung Daerah DIY, untuk mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 Kantor Perwakilan Daerah DIY serta mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Badan Penghubung Daerah DIY.

Demikian Surat Perintah Tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIS DAERAH

H. GATOT SAPTADI
NIP. 19590902 198803 1 003